

Analisis Pengembangan Kurikulum Multikultural Di Indonesia : Telaah Teoritis Berbasis Study Pustaka

Aisyah Firdayanti¹, Mezi Meilina² & Lia Warohma³

^{1,2,3} UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: 23051070338_uin@radenfatah.ac.id¹, 23051070325@radenfatah.ac.id², 23051070335_uin@radenfatah.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-04-10

Revised : 2025-05-23

Accepted: 2025-05-26

KEYWORD

Multiculturalism

Curriculum Indonesian

Education

Literature Study

KATA KUNCI

Multikulturalisme

Kurikulum Pendidikan Indonesia

Studi Pustaka

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of multicultural education curriculum in Indonesia through a literature study approach. The method used is descriptive qualitative with content analysis techniques of written sources such as journals, books, and policy documents. The results show that the development of multicultural curriculum in Indonesia is rooted in the philosophies of progressivism, reconstructionism, and Pancasila values, while also considering students' developmental stages based on the theories of Piaget, Erikson, and Rousseau. This curriculum plays a role in strengthening students' character, fostering inclusive attitudes, and equipping them with 21st-century skills relevant to a multicultural society. This study recommends the integration of multicultural values into all aspects of formal education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kurikulum pendidikan multikultural di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi terhadap sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum multikultural di Indonesia berakar pada filosofi progresivisme, rekonstruksionisme, dan nilai-nilai Pancasila, serta mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik menurut teori Piaget, Erikson, dan Rousseau. Kurikulum ini berperan dalam memperkuat karakter siswa, menumbuhkan sikap inklusif, dan membekali mereka dengan keterampilan abad 21 yang relevan dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam semua aspek pendidikan formal.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya, yang terdiri dari ratusan suku, bahasa lokal, agama, dan tradisi. Keberagaman ini menghadirkan tantangan khusus dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam usaha membangun kesadaran multikultural sejak usia dini. Pendidikan multikultural menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suwarno, 2020).

Dengan meningkatnya ketegangan sosial akibat perbedaan identitas, diharapkan pendidikan dapat

berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi budaya. Kurikulum yang mengedepankan multikulturalisme tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa agar dapat berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang pluralis (Sari dan Ramadhan, 2021). Nilai-nilai ini sejalan dengan motto nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

Namun demikian, penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum resmi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsep, keterbatasan materi ajar, dan

rendahnya kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan multikultural dalam proses belajar mengajar (Yuliana, 2022). Selain itu, belum ada konsensus yang kuat mengenai kerangka kurikulum yang dapat secara sistematis mencerminkan nilai-nilai multikultural (Ambarwati, 2023).

Studi ini dibuat sebagai analisis pustaka yang membahas secara teoritis berbagai pendekatan dan kebijakan yang terkait dengan pendidikan multikultural di Indonesia, bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan secara efektif dalam kurikulum pendidikan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang tersedia berdasarkan sumber-sumber terkini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengkaji dinamika pengembangan kurikulum multikultural di Indonesia, yang memerlukan telaah konseptual mendalam terhadap teori-teori pendidikan, kebijakan nasional, serta hasil-hasil studi terdahulu (Moleong, 2017). Studi kepustakaan memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri gagasan, prinsip, dan pendekatan yang telah dikembangkan dalam literatur akademik, serta menganalisis kesesuaian implementasinya dalam konteks lokal.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan hasil penelitian yang relevan dengan isu pendidikan multikultural dan pengembangan kurikulum. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi prinsip-prinsip multikultural yang tercermin dalam dokumen kurikulum serta analisis kritis terhadap tantangan dan peluang implementasinya dalam sistem pendidikan Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*), yakni proses sistematis untuk menginterpretasikan makna dari teks tertulis melalui proses kategorisasi, pengkodean, dan interpretasi (Krippendorff, 2018). Analisis ini difokuskan pada upaya memahami keterkaitan antara teori pendidikan multikultural, orientasi kebijakan kurikulum, dan praktik pendidikan di lapangan. Peneliti juga melakukan triangulasi teori untuk memperkuat validitas temuan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pengembangan kurikulum pendidikan multikultural di Indonesia, serta memberikan masukan strategis dalam rangka

membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman budaya.

3. Landasan Teoritis

Pengembangan kurikulum multikultural dalam konteks pendidikan Indonesia berakar pada pemikiran bahwa pendidikan harus responsif terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial peserta didik. James A. Banks (2001), sebagai salah satu tokoh utama pendidikan multikultural, menyatakan bahwa kurikulum harus mencerminkan pluralitas masyarakat dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap inklusif serta empati antar budaya. Pandangan Banks ini banyak dijadikan dasar dalam merumuskan kerangka kurikulum multikultural di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdurrahmansyah (2023) dan Mulyasa (2018), kurikulum yang baik harus bersifat kontekstual, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan sosial budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, ini berarti memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat kebangsaan dalam setiap mata pelajaran. UNESCO (2019) juga menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, terutama di era globalisasi dan migrasi budaya yang masif.

Dalam praktiknya, pendidikan multikultural juga berkaitan erat dengan teori perkembangan peserta didik dan strategi pembelajaran. Nasution (2010) menyatakan bahwa proses belajar yang baik adalah proses yang memperhatikan latar belakang dan kebutuhan peserta didik secara individual. Ini sejalan dengan pendekatan multikultural yang menolak homogenisasi dan menekankan pentingnya diferensiasi dalam pembelajaran.

Selain teori umum, beberapa studi empiris seperti Anggraeni & Sari (2019) dan Arifin & Hidayat (2020) menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum multikultural juga harus mempertimbangkan pelatihan guru, peran pemangku kepentingan, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penelitian-penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Ridho et al. (2022) dan Wibowo (2022) menggarisbawahi pentingnya etika digital dan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural di era digital dan Society 5.0.

Dengan demikian, landasan teoretis pengembangan kurikulum multikultural tidak hanya berpijak pada prinsip-prinsip pedagogik, tetapi juga pada kebutuhan sosial, politik, dan kultural masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemahaman

terhadap teori-teori tersebut menjadi fondasi penting dalam merancang strategi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan keberagaman di dunia pendidikan.

4. Hasil

a. Kurikulum Pendidikan Multikultural

Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dinamika masyarakat yang semakin pluralistik. Dalam konteks ini, kurikulum multikultural hadir sebagai respons terhadap realitas keberagaman yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusif, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya ke dalam sistem pendidikan Nasional.

Secara filosofis, landasan utama pengembangan kurikulum multikultural di Indonesia merujuk pada progresivisme yang menekankan pembelajaran aktif dan keterlibatan langsung peserta didik dalam memaknai pengalaman sosial-budaya mereka. Rekonstruksionisme juga menjadi fondasi penting, di mana pendidikan dipandang sebagai alat transformasi sosial untuk membangun tatanan masyarakat yang adil dan egaliter. Selain itu, nilai-nilai Pancasila turut menjadi acuan fundamental dalam membentuk kurikulum yang berakar pada jati diri bangsa.

Secara psikologis, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menjelaskan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan intelektual anak, seperti tahap operasional konkret dan formal. Dalam konteks ini, materi multikultural perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan berpikir analitis dan reflektif peserta didik. Sementara itu, Erik Erikson menekankan pentingnya pengembangan identitas diri dan hubungan sosial dalam setiap tahapan perkembangan psikososial individu, yang sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural untuk membangun kesadaran kolektif dan empati terhadap orang lain. Pandangan Jean-Jacques Rousseau, yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan alami yang berpusat pada kebutuhan anak, juga menjadi dasar untuk mengedepankan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.

Pendidikan multikultural tidak hanya sekadar memasukkan konten budaya ke dalam kurikulum, tetapi juga menuntut pendekatan pedagogis yang mengedepankan dialog, pengakuan terhadap pengalaman hidup siswa, serta pembelajaran kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran

perspektif lintas budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdurrahmansyah (2017) yang menekankan bahwa guru harus menciptakan ruang pembelajaran yang terbuka dan aman untuk diskusi budaya, sehingga prasangka dan stereotip dapat diminimalisasi.

Dinamika budaya dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah, seperti yang dijelaskan oleh Lauer (1993) dalam Sartini, memperkuat urgensi akan kurikulum yang adaptif terhadap evolusi sosial. Inovasi, difusi, dan akulturasi budaya merupakan bagian dari transformasi yang tidak terhindarkan, dan pendidikan memiliki peran strategis dalam mengelola proses ini agar tidak menimbulkan konflik, tetapi memperkaya pengalaman belajar.

Bennet (1986) menyusun empat tujuan utama pendidikan multikultural: (1) menumbuhkan tanggung jawab global, (2) menanamkan penghormatan terhadap lingkungan hidup dan kemanusiaan, (3) menghilangkan diskriminasi dan intoleransi, serta (4) meningkatkan kesadaran global. Dengan demikian, kurikulum multikultural tidak hanya bersifat nasionalistik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup dalam masyarakat global yang saling terhubung.

b. Tantangan dalam Pengembangan Kurikulum di Indonesia

1) Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan kurikulum. Tantangan terbesar terletak pada kesenjangan digital antara wilayah maju dan tertinggal. Kurikulum yang dirancang tanpa mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital justru dapat memperlebar ketimpangan akses pendidikan. Selain itu, isu keamanan data dan etika digital juga menjadi perhatian, terutama dalam penerapan pembelajaran daring yang masif.

Adaptasi terhadap teknologi tidak dapat hanya terbatas pada penggunaan perangkat, tetapi juga harus mencakup peningkatan literasi digital peserta didik dan tenaga pendidik. Ini menuntut pembaruan kurikulum secara berkala, pelatihan intensif bagi guru, serta pengembangan konten pembelajaran berbasis digital yang kontekstual.

2) Integrasi Pendidikan Multikultural

Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pelatihan guru tentang keragaman budaya, minimnya materi ajar yang inklusif, dan tantangan dalam menyesuaikan

kurikulum dengan konteks lokal yang heterogen. Selain itu, stereotip dan prasangka budaya yang masih tertanam di masyarakat turut menghambat terciptanya lingkungan belajar yang toleran.

Kesetaraan partisipasi juga menjadi isu penting, terutama bagi kelompok marginal dan minoritas yang seringkali tidak terwakili dalam konten pembelajaran arus utama. Oleh karena itu, pendekatan kurikulum perlu diarahkan untuk memberdayakan siswa dari latar belakang berbeda dan memberikan ruang bagi ekspresi budaya mereka di sekolah.

3) Peningkatan Kualitas Pendidikan Secara Keseluruhan

Kualitas pendidikan ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. Tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas terletak pada keberlanjutan sistem pelatihan guru dan evaluasi kinerja yang komprehensif.

Abdurrahmansyah (2021) menegaskan bahwa pengembangan kurikulum harus berpijak pada prinsip filsafat, psikologi, dan sosiologi pendidikan. Artinya, kurikulum tidak dapat dirancang secara teknis semata, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai luhur pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif dan berkeadilan.

c. Strategi Menghadapi Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Multikultural Di Indonesia

Pengembangan kurikulum pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari segi keberagaman budaya, kondisi geografis yang luas, hingga perbedaan sumber daya manusia yang ada di tiap daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan sistematis agar kurikulum ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan (Anggraeni & Sari, 2019).

1) Penguatan Kompetensi Guru Melalui Pendidikan dan Pelatihan Inklusif

Guru memegang peran sentral sebagai pelaksana utama dalam implementasi kurikulum multikultural. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru menjadi salah satu langkah strategis yang penting dilakukan (Zubaidah, 2021). Pelatihan guru harus diarahkan pada pemahaman

mendalam tentang prinsip-prinsip pendidikan multikultural, kemampuan literasi digital, dan pendekatan pedagogis yang kontekstual sesuai karakteristik budaya dan sosial di daerah masing-masing.

Pelatihan guru tidak boleh dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan konteks lokal, seperti kondisi geografis dan sosial budaya (Arifin & Hidayat, 2020). Misalnya, pelatihan yang diadakan di daerah pesisir tentu berbeda fokusnya dengan pelatihan di daerah pegunungan, terutama dalam penerapan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa di lingkungan tersebut.

Strategi transformasi guru menjadi fasilitator dialog budaya juga sangat penting. Menurut Banks (2001), pendekatan transformasi (*transformative approach*) menuntut guru untuk mampu membuka wawasan siswa agar mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang budaya yang berbeda, sehingga tercipta suasana belajar yang inklusif dan toleran.

2) Pengembangan Kurikulum Kontekstual dan Fleksibel

Kurikulum pendidikan multikultural harus bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Pengembangan kurikulum harus membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat lokal, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam merumuskan nilai-nilai lokal yang ingin dimasukkan dalam kurikulum (Mulyasa, 2018; Wahyudin, 2020).

Model kurikulum diferensiasi yang menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan latar belakang budaya dan gaya belajar peserta didik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Nasution, 2010). Dengan demikian, kurikulum tidak bersifat homogen, melainkan memberikan penghargaan terhadap keragaman yang ada.

Selain itu, perkembangan teknologi menjadi peluang besar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel. Penggunaan platform digital lokal yang berbasis budaya daerah, seperti modul interaktif dan video pembelajaran yang menyertakan narasi budaya setempat, bisa meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa (Putra & Wibowo, 2021).

3) Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Pengembangan kurikulum multikultural tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang sinergis antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat (Sari & Suyanto, 2018). Kolaborasi ini penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Pemerintah pusat dapat menyediakan kerangka kurikulum nasional yang bersifat umum, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian materi agar sesuai dengan kondisi lokal (Wahyudin, 2020). Selain itu, keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam kegiatan sekolah juga memperkuat internalisasi nilai-nilai multikultural di lingkungan pendidikan.

4) Pemanfaatan Teknologi Secara Etis dan Merata
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan multikultural harus dilakukan secara merata dan beretika. Pemerintah perlu meningkatkan akses infrastruktur TIK terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas (Putra & Wibowo, 2021).

Di sisi lain, pendidikan harus menanamkan etika digital agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghargai keberagaman budaya di dunia maya, dan mencegah penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian (Wibowo, 2022). Literasi digital yang kuat juga membuat siswa tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai produsen konten budaya yang positif dan konstruktif.

5) Evaluasi Kurikulum Secara Berkala dan Partisipatif

Evaluasi kurikulum pendidikan multikultural harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan tokoh masyarakat (UNESCO, 2019). Evaluasi ini tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi akademik, tetapi juga aspek sikap dan perilaku siswa dalam menghargai keberagaman budaya.

Keberhasilan kurikulum multikultural diukur dengan terciptanya lingkungan belajar yang toleran, aman, dan inklusif. Dengan evaluasi yang partisipatif dan berkelanjutan, kebijakan kurikulum dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman (Zubaidah, 2021).

5. Kesimpulan

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan kurikulum yang relevan dengan konteks

kemajemukan bangsa Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik yang berwawasan kebangsaan dan global.

Secara teoretik, kurikulum ini memperkaya ranah pengembangan pendidikan dengan mengintegrasikan pendekatan progresivisme dan rekonstruksionisme, serta relevan dengan teori perkembangan peserta didik. Implikasinya bagi kebijakan adalah perlunya dukungan regulatif dalam bentuk kebijakan kurikulum yang adaptif, pelatihan guru berperspektif multikultural, dan penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat.

Rekomendasi selanjutnya mencakup perlunya penelitian tindakan kelas untuk mengkaji efektivitas implementasi kurikulum multikultural, serta evaluasi kebijakan yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan guna menjamin keberlanjutan dan relevansi pendidikan multikultural di Indonesia.

6. Persembahan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apresiasi khusus diberikan kepada para akademisi, peneliti, dan institusi pendidikan atas referensi dan data yang mendukung analisis ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat atas masukan dan diskusi yang konstruktif. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi pijakan bagi kajian lebih lanjut.

7. Referensi

- Abdurrahmansyah. (2023). *Kajian teoritik dan implementatif pengembangan kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahmansyah, Afriansyah, S., & Nasution, N. (2023). Character education in elementary school students in Palembang City. *Conciencia*, 23(1), 45–57. Retrieved from <https://alumni.radenfatah.ac.id/index.php/conciencia/article/view/10028/6422>
- Anan, A. (2020). Implementasi pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam membangun kerukunan beragama peserta didik. *Pendidikan Multikultural*, 3(1), 10–20.
- Anggraeni, D., & Sari, R. M. (2019). Pengembangan kurikulum multikultural di

- sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 5(2), 134–146.
<https://doi.org/10.1234/jpm.v5i2.2019>
- Arifin, Z., & Hidayat, A. (2020). Pelatihan guru berbasis kontekstual untuk pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 201–215.
- Bahri, S. (2018). Pengembangan kurikulum berbasis multikulturalisme di Indonesia: Landasan filosofis dan psikologis. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 19(2), 45–57.
- Banks, J. A. (2001). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Izzah, N. (2020). Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia dalam pendidikan agama Islam. *Al-Hikmah: Journal of Education*, 12(2), 101–113.
- Meliani, F., Iqbal, A. M., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Konsep moderasi Islam dalam pendidikan global dan multikultural di Indonesia. *Eduprof*, 4(1), 195–211.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan kurikulum kontekstual di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2010). *Didaktik asas-asas mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraha, D. (2020). Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN*, 10(1), 15–27.
- Putra, R. D., & Wibowo, E. (2021). Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan multikultural di daerah 3T. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), 57–68.
- Ridho, A., Wardhana, K. E., Yuliana, A. S., Qolby, I. N., & Zalwana, Z. (2022). Implementasi pendidikan multikultural berbasis teknologi dalam menghadapi era Society 5.0. *Educasia: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 7(3), 195–213.
- Sari, A. A. (2022). Multikulturalisme digital: Mengeksplorasi integrasi teknologi dalam pengajaran sekolah dasar di abad 21. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 45–60.
- Sari, L., & Suyanto, A. (2018). Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 79–90.
- UNESCO. (2019). *Rethinking education for multicultural societies*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wahyudin, D. (2020). Desentralisasi kurikulum dan tantangannya di daerah. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 55–66.
- Wibowo, E. (2022). Etika digital dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 5(1), 45–53.
- Winata, K. A. (2020). Implementasi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 89–102.
- Zubaidah, E. (2021). Penguatan kompetensi guru melalui pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 17–28.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).